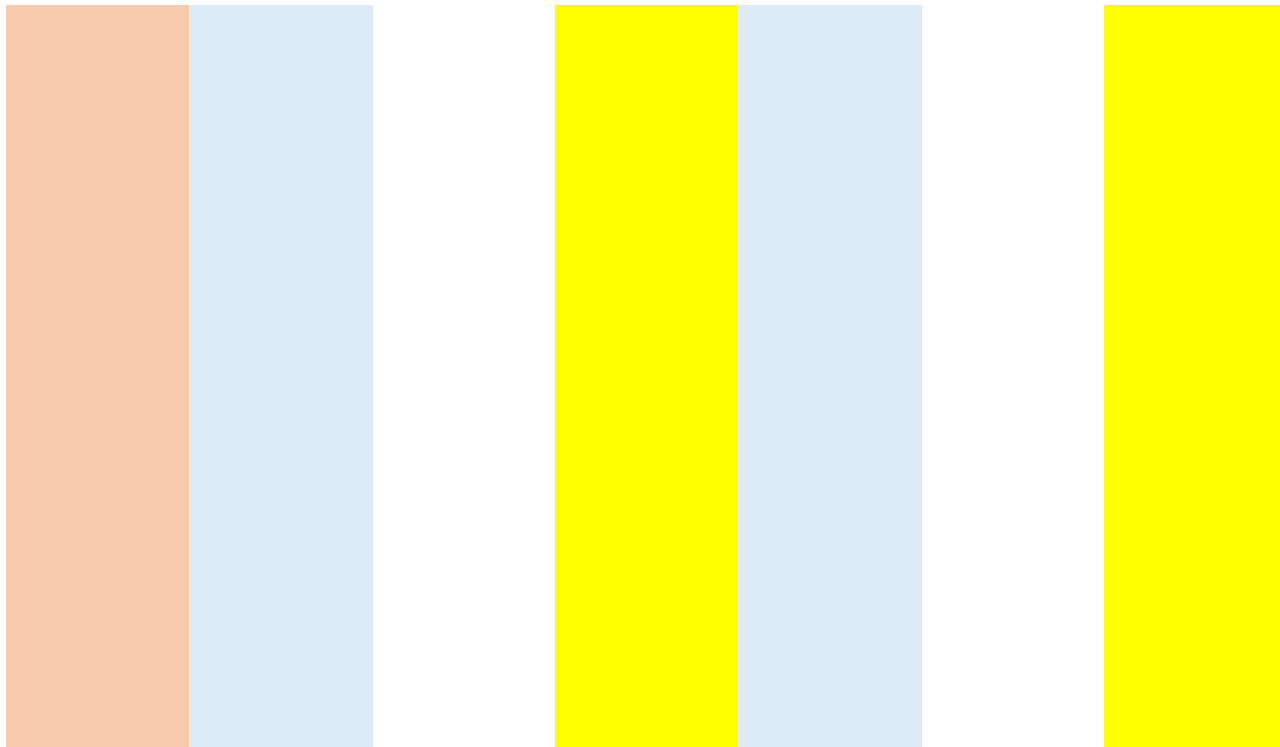


ORGANISASI		FUNGSI			PROSES BISNIS LEVEL 0				
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO		TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN			SASARAN DAERAH DAN INDIKATOR SASARAN DAERAH				
VISI	Misi 3	Tujuan daerah	Indikator Tujuan daerah	Formula Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (IKU Daerah)	Formula Indikator Sasaran Daerah	Program Prioritas Daerah	Indikator Program Daerah
<b>Bungo Maju dan Sejahtera</b>	Meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku ekonomi kreatif melalui dukungan kelembagaan dan permodalan.	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Kuat dan Berdaya Saing	Indeks Ekonomi Kerakyatan	$M3.1+M3.2 / 2$	Peningkatan Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi	Jumlah Investasi yang Masuk	Pengembangan Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi



Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Nilai Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Kemenpan RB	Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Hasil survei	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah

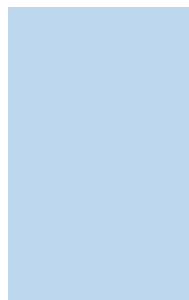
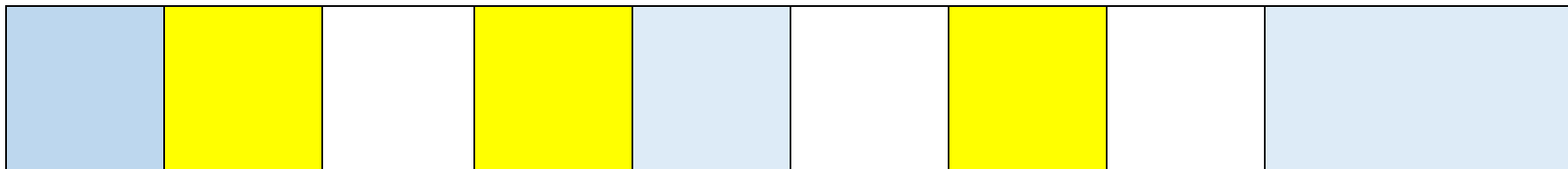


PROSES BISNIS LEVEL 1

SASARAN OPD, INDIKATOR SASARAN OPD, PROGRAM OPD, SASARAN PROGRAM OPD DAN INDIKATOR PROGRAM OPD

tujuan OPD	indikator tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD (IKU OPD)	Formula Indikator Sasaran OPD	Program OPD (PMDN No. 90 Thn 2019)	Indikator Program OPD	Sasaran Program OPD	Formula Indikator Program OPD
Terpenuhi peningkatan pemberdayaan potensi Sumber Daya Daerah dan Peningkatan Promosi Peluang Investasi	Jumlah potensi sumber daya daerah dan Jumlah nilai investasi	Meningkatnya Investasi Daerah Kabupaten Bungo	Nilai Investasi	Jumlah Investasi yang Masuk	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi	Meningkatnya Investasi Daerah Kabupaten Bungo	<i>Jumlah Nilai Investasi yang masuk</i>
				S				
					Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	Meningkatnya Jumlah Investor yang Masuk	<i>Jumlah Investor yang menanamkan modalnya</i>





**PROSES BISNIS LEVEL 2**

**KEGIATAN OPD, SASARAN KEGIATAN OPD DAN INDIKATOR KEGIATAN OPD**

<b>Kegiatan OPD (PMDN No. 90 Thn 2019)</b>	<b>Sasaran Kegiatan OPD</b>	<b>Indikator Kegiatan OPD</b>	<b>Formula Indikator Kegiatan OPD</b>	<b>Sub Kegiatan OPD (PMDN No. 90 Thn 2019)</b>	<b>Sasaran Sub Kegiatan OPD</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan OPD</b>
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Investor dan Pelaku Usaha	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Penanaman Modal dan Fasilitas Penanaman Modal	<i>Jumlah Peraturan Yang Dihasilkan dibagi Nilai Investasi</i>	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Investor dan Pelaku Usaha	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Penanaman Modal dan Fasilitas Penanaman Modal
				Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Investor dan Pelaku Usaha	Terlaksananya Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Penanaman Modal dan Fasilitas Penanaman Modal
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen RUPM Kabupaten Bungo	Tersusunnya Dokumen RUPM Kabupaten Bungo sampai Tahun 2025	<i>Jumlah Dokumen dibagi Nilai dan Target Investasi</i>	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bungo dan OPD Terkait	Terlaksananya penyusunan RUPM
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kabupaten Bungo dan OPD Terkait	Terlaksananya penyusunan dokumen peta potensi dan peluang investasi
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Investor yang Masuk	Jumlah Investor	<i>Jumlah Investor yang menanamkan modalnya</i>	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Investor dan Pelaku Usaha	Terwujudnya strategi promosi melalui data website dan bahan promosi media cetak potensi unggulan daerah yang dapat dipromosikan kepada calon investor
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Investor dan Pelaku Usaha	Terlaksananya event-event promosi baik didalam maupun luar negeri sehingga meningkatnya investasi di Kab. Bungo

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan nilai investasi	Nilai Investasi	<i>IU, IUK, LKPM, IO</i>	Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam Merealisasikan kegiatan usahanya	Kegiatan usaha	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam Merealisasikan kegiatan usahanya
				Bimbingan Teknis Kepada pelaku Usaha	Pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan <b>berusaha berbasis risiko</b>
				Pengawasan Penanaman Modal	Pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang telah di analisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan <b>berusaha</b>
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan realisasi investasi	Jumlah dokumen pemenuhan data perizinan dan non perizinan	<i>Data IUK, IU, NIB, Komitmen</i>	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Laporan perkembangan rencana dan realisasi penanaman modal	Penyajian dan pemanfaatan data informasi perizinan dan non perizinan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	Persentase Capaian Target Layanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu	$\frac{\text{Jml Pemohon Perizinan/Nonperizinan yang dilayani}}{\text{Jml Target Layanan Perizinan/Nonperizinan}} \times 100$	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Meningkatnya Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan sesuai SOP secara elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan dan Nonperizinan yang terbit sesuai SOP Secara Elektronik
				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Meningkatnya jumlah usaha yang dilakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Kegiatan Usaha yang dilakukan Pemantauan terhadap pemenuhan komitmen Perizinan dan Nonperizinannya
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang selesai ditindaklanjuti



				Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Berita Acara Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
--	--	--	--	---	---	---


  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
**I. SAHRIZAL**  
 Pembina Utama Muda / IV.c  
 NIP. 19660913 199303 1 001